

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, EKONOMI DAN EKOLOGI, *SUSTAINABILITY COMMUNICATION* DAN *SUSTAINABILITY REPORTING*

M. Fani Cahyandito¹

Abstract

Since the release of the Brundtland Report in 1980 which was then followed by the Summit Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, the vision of sustainable development is always being promoted. Unfortunately, there is only few of us who understand exactly what sustainable development is, even in rich countries. Sustainability communication is one of the proposed concept to answer this challenge. Sustainability communication which was raised in the late of 1990, shifted the terminus of environmental communication. With this concept, it is hoped that people will know and understand more about what is happening around them: what are the problems in environmental, social and economic field which hinder the the achievement of the goal of sustainable development. At this point, sustainability communication plays a very important role. One of the communication instrument in accordance with the sustainability communication concept which is now gained its popularity is the so-called sustainability reporting. There are so many advantages the company can have by producing and publishing a sustainability report. Sustainability reporting is now believed as an instrument to boost company image and to maintain a mutual relationship with the stakeholders as the key aspect to win business competition.

Keywords: Sustainable development, Sustainability communication, Environmental communication, Social Responsibility, Sustainability reporting, Stakeholder relationship.

1. Pendahuluan

Tulisan ini berisi rangkaian penjelasan mendasar mengenai isu pembangunan berkelanjutan dan masalah-masalah yang melatarbelakanginya, interaksi antara ekonomi dan ekologi, serta *sustainability reporting* sebagai salah satu bentuk *sustainability communication*. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak dilengkapi dengan analisa yang mendetail dan mendalam mengenai topik-topik yang diangkat, namun hanya menguraikan uraian secara singkat dan sederhana mengenai keterkaitan antara ekonomi dan ekologi, keterbatasan alam dalam mendukung kehidupan manusia sehingga perlu adanya upaya untuk menyadarkan dan membuat manusia peduli tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga pada lingkungan sosialnya (*sustainability communication*). Uraian dilanjutkan dengan topik *sustainability reporting* sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga negara ataupun stakeholdernya sebagai salah satu upaya penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan.

2. Pembangunan Berkelanjutan dan Problema Utamanya

Perbincangan dan perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan yang diawali oleh terbitnya *Brundtland Report* pada tahun 1980, semakin diintensifkan dengan Konferensi PBB

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Jalan Dipati Ukur 35 Bandung 40132, Tel. (022) 2509055, Fax. (022) 2509055) dan Staf Peneliti pada Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Jalan Cimandiri 6 Bandung 40115, Tel. (022) 4239954, Fax. (022) 4239954).

mengenai „Lingkungan Hidup dan Pembangunan“ di Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini melahirkan Agenda 21 yang ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagai langkah konkret bagi implementasi pembangunan berkelanjutan pada skala global. Sepuluh tahun setelah *Rio Conference*, PBB pada tahun 2002 kembali menyelenggarakan konferensi di Johannesburg dengan judul “*The 2002 World Summit for Sustainable Development*” untuk mengevaluasi perkembangan penerapan visi pembangunan berkelanjutan di dunia.

Forum for the Future, UK, memberikan gambaran untuk memahami pembangunan berkelanjutan sebagai berikut (Forum for the Future, 2003:13):

Sustainable = capacity to continue
Development = path of human progress

Jadi *sustainable development* adalah (Forum for the Future, 2003:13):

“A path for human progress that has the capacity to continue”

Definisi ini sesuai dengan definisi pembangunan berkelanjutan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yang dituangkan dalam *Our Common Future* atau *Brundtland Report* (WCED 1987:43):

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”

Namun ternyata setelah 10 tahun ‘pembangunan berkelanjutan’ dicanangkan pada konferensi di Rio de Janeiro, konferensi di Johannesburg mencatat bahwa masih banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di segala aspek pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya, ada tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang ada pada setiap dimensi tersebut.

a. Dimensi Ekologi

Salah satu tema/masalah pokok dalam dimensi ini adalah perubahan iklim. Selama 50 tahun terakhir telah dapat dibuktikan bahwa pemanasan global yang sekarang ini kita rasakan terjadi terutama karena ulah manusia sendiri. Emisi dari gas-gas rumah kaca seperti CO₂ dan N₂O dari aktivitas manusia adalah penyebabnya. Konsentrasi gas CO₂ di atmosfer naik 30% selama 150 tahun terakhir. Kenaikan jumlah emisi CO₂ ini terutama disebabkan karena pembakaran sumber energi dari bahan fosil (antara lain minyak bumi). Selain itu, perubahan dalam penggunaan sumber daya alam lainnya juga memberikan kontribusi pada kenaikan jumlah CO₂ di atmosfer: 15% oleh penggundulan dan pembakaran hutan dan lahan untuk diubah fungsinya (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) (WRI 2000, UBA 2002, TIME Magazine 2006).

Masalah ekologi lainnya adalah degradasi tanah atau hilangnya kesuburan tanah. Ini dapat diakibatkan oleh erosi akibat air dan angin, penggaraman dan pengasaman tanah, dll. Penyebab hilangnya kesuburan tanah lainnya adalah hilangnya lapisan humus dan mikro organisme, zat makanan pada tanah, dan kemampuan tanah menguraikan sampah/limbah. Tanah yang tandus (kering) adalah akibat dari degradasi sumber daya tanah seperti yang sudah lama terjadi pada beberapa daerah tandus di Indonesia, seperti di Jawa pada daerah

Gunung Kidul, Yogyakarta. Di seluruh dunia, 15% tanah mengalami degradasi. Selain diakibatkan erosi oleh air dan angin, degradasi tanah ini juga disebabkan oleh penggunaan zat-zat kimia (pestisida) (WRI, 2000).

Terancamnya kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati oleh tangan manusia juga menjadi masalah ekologi lainnya. Setiap tahunnya 6000 jenis hewan punah yang terdiri dari 13% unggas, 25% mamalia, dan 34% ikan (Le Monde diplomatique 2003, WRI 2000). Hilang atau punahnya keanekaragaman biologis tidak hanya berarti sumber daya alam yang tidak ternilai yang dapat digunakan untuk obat-obatan dan tempat berekreasi hilang, tapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan, mengancam kemampuan alam sebagai penyedia sumber daya untuk produksi (fungsi ekonomis) dan dalam melakukan fungsi regulasinya (lihat bagian “Interaksi antara Ekonomi dan Ekologi”).

Konsumsi air dari tahun ke tahun juga terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri dan usaha-usaha di sektor pertanian. Dari total konsumsi air di seluruh dunia, sekitar 70% digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Pencemaran air dan tanah semakin memperburuk ketersediaan air bersih bagi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran air dan tanah ini terutama disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida untuk pertanian dan perkebunan (Gambar 1) (WRI, 2000).



Gambar 1: Penggunaan pestisida pada sektor pertanian (Foto koleksi BaliBisnis.com)

b. Dimensi Sosial

Masalah utama dalam dimensi ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Dalam kurun waktu seratus tahun terakhir, pertumbuhan penduduk melonjak cepat terutama pada negara berkembang (UNDP, 2002). Diperkirakan jumlah penduduk dunia akan naik sampai 7,8 milyar orang pada tahun 2025, dimana 6,7 milyar orang hidup di negara berkembang. Kenaikan jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya rendahnya tingkat pendidikan, tidak memadainya jaminan sosial pada negara yang bersangkutan, budaya dan agama/kepercayaan, urbanisasi, dan diskriminasi terhadap wanita (Enquete Commission, 2002).

Faktor-faktor diatas menimbulkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kemiskinan, dan kekurangan air yang tentunya berujung pada masalah kekurangan gizi pada manusia. Antara tahun 1998-2000, menurut perkiraan FAO, terdapat 840 juta manusia yang mengalami kekurangan gizi kronis, 800 juta diantaranya hidup di negara berkembang (FAO, 2002). Enam juta anak di bawah 5 tahun meninggal akibat kekurangan gizi setiap tahunnya (Gambar 2). Kesehatan manusia yang hidup di negara berkembang juga diperburuk dengan adanya peperangan (Gambar 3) dan pencemaran air. Saat ini lebih

dari setengah milyar manusia hidup tanpa akses ke air bersih dan 2,5 milyar manusia hidup tanpa prasarana sanitasi (kebersihan) yang layak (UNDP, 2002). Akibatnya adalah penyakit dan kematian sekitar 5 juta manusia setiap tahunnya.



Gambar 2: Anak kurang gizi (Foto koleksi PSP)



Gambar 3: Peperangan (Foto koleksi Al-Jazeera)

Kesenjangan antara negara miskin dan kaya juga semakin besar pada tahun-tahun belakangan ini (UNDP, 2002). Data pada tahun 1999, di negara miskin, 2,8 milyar manusia hanya memperoleh 2 US Dollar untuk hidup tiap harinya, 1,2 milyar lainnya bahkan harus hidup hanya dengan 1 US Dollar. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antara negara kaya dan miskin/berkembang, bahkan kesenjangan pendapatan ini juga terjadi di dalam satu negara sendiri (Gambar 3).

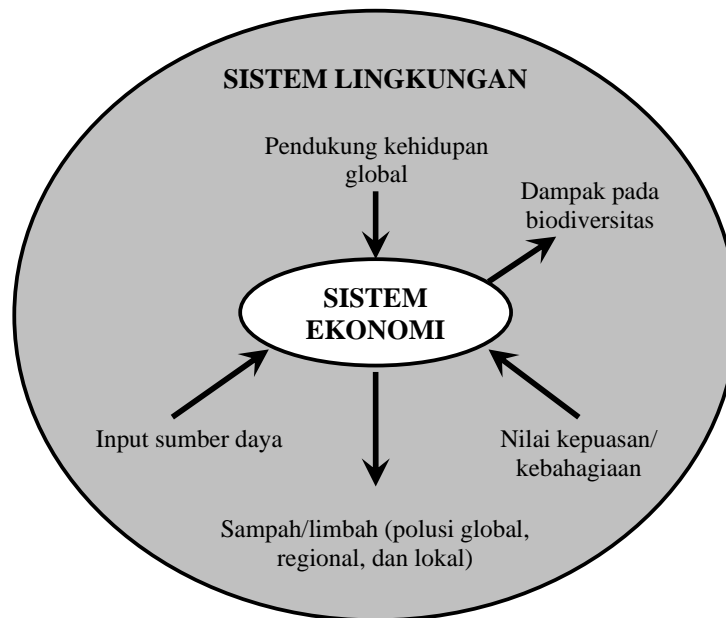


Gambar 3: Gambaran kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Jakarta (Foto koleksi Patmadiwiria 2000)

c. Dimensi Ekonomi

Masalah utama pada dimensi ekonomi adalah perubahan global dan globalisasi. Maksudnya adalah perubahan keadaan lingkungan hidup (ekologi) global, globalisasi ekonomi, perubahan budaya dan konflik utara-selatan. Globalisasi yang muncul sejak tahun 1990-an, tidak dapat dibendung kehadirannya dan mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap negara. Kemajuan teknologi, komunikasi dan telekomunikasi serta transportasi semakin mendukung arus globalisasi sehingga hubungan ekonomi antar negara dan region menjadi sangat mudah. Dukungan pemerintah melalui kemudahan bea cukai semakin mendorong perdagangan bebas (Enquete Commission, 2002). Dalam era globalisasi, semua negara harus mempersiapkan diri setangguh mungkin agar tidak terlindas oleh negara yang lebih kaya dan maju.

3. Interaksi antara Ekonomi dan Ekologi



Gambar 4: Interaksi antara Ekonomi dan Ekologi (Hanley *et al.*, 2001:5)

Berbagai masalah yang timbul pada dimensi lingkungan dan sosial, pada dasarnya tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui sistem ekonominya dalam memproduksi barang dan jasa.

Dari gambar 4 di atas, kita dapat memahami bahwa alam menyediakan/mensuplai sistem ekonomi dengan sumber daya alam berupa bahan baku dasar dan energi, baik yang dapat diperbaharui (dari hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan) maupun yang tidak dapat diperbaharui (batubara, minyak bumi) yang menjadi *input* bagi mesin ekonomi. Sistem ekonomi kemudian mentransformasikan input ini menjadi output untuk memenuhi kebutuhan manusia (kayu menjadi kertas, minyak bumi menjadi BBM).

Selain itu, alam juga memberikan servis dalam memungkinkan sistem ekonomi menjalankan aktivitasnya. Dukungan ini dapat berupa regulasi iklim, operasi dari siklus air, regulasi dari komposisi gas-gas di atmosfer, siklus nutrisi, dsb. Tanpa adanya berbagai dukungan ini (*basic life support*) mustahil kelangsungan hidup manusia dapat terjaga, apalagi sampai mampu menjalankan sistem ekonomi.

Tidak berhenti sampai disitu, alam juga memberikan manusia nilai kepuasan/kebahagiaan yang dapat dinikmati secara langsung (*amenity values*). Manusia akan mendapatkan kesenangan atau kepuasan dengan melihat langsung atau menikmati pesona keindahan alam (flora dan fauna), dengan melakukan hiking, mendaki gunung/panjat tebing, dengan memancing, dsb (Gambar 5). Ini semua adalah nilai kepuasan yang ditawarkan oleh alam.



Gambar 5: Berjalan-jalan di dalam hutan (Foto koleksi PhotoCase)

Namun sebaliknya, apa balas jasa yang diberikan oleh sistem ekonomi kepada alam? Ekonomi menggunakan alam sebagai tempat sampah, yang dimulai dari eksploitasi sumber daya alam (material dan energi) untuk dijadikan bahan baku, proses produksi, sampai pada aktivitas konsumsi, yang kesemuanya menghasilkan sampah baik sampah padat, cair maupun gas.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sistem ekonomi dan ekologi sangat terkait satu sama lain. Kelangsungan sistem ekonomi sangatlah tergantung dari sistem ekologi. Namun yang terjadi

saat ini adalah sistem yang tidak mutualisme. Sistem yang satu hanya menjadi parasit bagi sistem yang lain.

Memperhatikan masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang masih bermunculan, maka *sustainability communication* atau yang dapat diterjemahkan sebagai komunikasi pembangunan berkelanjutan (KPB) antara pemerintah dan warga negaranya atau antara perusahaan dengan stakeholdernya, tampaknya dapat menjadi solusi yang patut ditawarkan. Secara teoritis, instrumen ini dapat digunakan sebagai media dialog untuk menyadarkan semua pihak akan bahaya yang mungkin muncul akibat populasi manusia dari tahun ke tahun yang terus bertambah. Hal ini berarti bahwa produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia juga akan terus bertambah yang pada akhirnya akan mendorong konflik dengan ketersediaan sumber daya alam yang tidak tak terbatas. Keadaan ini mau tidak mau menuntut manusia untuk dapat mengubah/memperbaiki pola produksi dan konsumsinya ke arah yang mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, juga antara manusia satu dengan lainnya. Manusia modern haruslah mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknik dan teknologi agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keadilan, tidak hanya inter-generasi tapi juga intra-generasi (Cahyandito 2001; 2002; 2005).

4. Sustainability Communication

Sustainability communication atau komunikasi tentang seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (KPB), dalam skala nasional, adalah suatu proses saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu masyarakat yang terjamin masa depannya (*sustainable society*), dimana nilai-nilai dan norma-norma keadilan dijunjung tinggi.

Istilah *sustainability communication* (KPB) baru muncul pada diskusi akademis beberapa tahun lalu. Walaupun konsep pembangunan berkelanjutan sudah didengungkan sejak *Brundtlandt-Report* 1980 dan *Rio-Conference* 1992, namun sampai sekarang masih sangat sulit sekali menanamkan konsep ini ke kepala setiap warga negara. Suatu survei yang dilakukan di Jerman – suatu negara maju dimana pemerintah dan warga negaranya sangat mepedulikan masalah lingkungan dan sosial dalam praktek kehidupan sehari-hari – diketahui bahwa pengetahuan warga negara Jerman mengenai terminus ‘pembangunan berkelanjutan’ (PB) tidak mengalami peningkatan berarti sejak tahun 1998 (tahun 1998 hanya 15% masyarakat yang mengerti istilah PB, 2004 hanya 22%). Menurut survei ini, pengetahuan masyarakat mengenai istilah PB berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan mereka; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin istilah PB dikenal. Menurut survei ini pula, hal-hal yang paling sering dikaitkan dengan istilah PB adalah keadilan, perdagangan yang *fair* antara negara miskin dan kaya, dan penanganan/pengelolaan sumber daya alam (Michelsen, 2005).

Konsep KPB menggeser konsep *environmental communication* atau komunikasi lingkungan (KL) karena disadari bahwa konsep KL tidak lagi mampu memenuhi tuntutan stakeholder yang menginginkan informasi yang lengkap akan aktivitas dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu negara (makro) atau perusahaan (mikro) pada seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) - *triple-bottom-line*.

KL adalah bagian dari KPB yang merupakan suatu proses dialog terbuka dan komprehensif antara pemerintah dan warga negara dalam usaha mengembangkan dan mempertahankan

hubungan mutualisme secara berkesinambungan yang didasari atas konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah/perusahaan mengkomunikasikan visi/misi, norma/budaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial (*social responsibility, good governance*) agar terjadi dialog aktif dengan warga negara/stakeholder internal dan eksternalnya sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai yang pada akhirnya diharapkan berujung pada terjalinnya saling pengertian dan hubungan yang lebih erat antara kedua belah pihak sehingga pembangunan yang dicita-citakan/kesuksesan bisnis dapat terwujud (Sancassiani, 1996).

Dengan demikian, faktor komunikasi memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya bagi keberhasilan pembangunan negara/kesuksesan perusahaan, tapi lebih jauh lagi bagi pendidikan masyarakat mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Niklas Luhmann (1986) mengatakan “*Akan ada suatu keadaan dimana ikan atau bahkan manusia akan mati, berenang di sungai atau laut akan terserang penyakit, tidak ada lagi minyak bumi yang keluar dari tanah, suhu rata-rata turun atau naik, tapi selama itu semua tidak dikomunikasikan, tidak akan memberi pengaruh apapun pada masyarakat*” (diterjemahkan oleh penulis dari Michelsen 2005:25).

Komunikasi yang efektif membuat perusahaan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan stakeholdernya dan memperoleh *image* yang positif tidak hanya di mata pelanggan aktual dan potensial, tapi juga di mata stakeholder lainnya sehingga perusahaan akan mampu bersaing secara kompetitif. Selain itu, perusahaan di saat yang sama juga akan mampu melakukan diferensiasi dirinya dari perusahaan lainnya. Sebaliknya, menyepelekan pentingnya komunikasi akan mengurangi kepercayaan stakeholder pada perusahaan yang pada akhirnya, kemungkinan besar, akan memberikan dampak negatif pada sukses perusahaan di bidang keuangan.

Dr. Erich Becker, President Austrian Business Council for Sustainable Development (Juli 2002) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang terus-menerus melakukan dialog terbuka dengan stakeholdernya akan mampu mengenali situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan secara dini dan akan mampu menghindari resiko serta menggunakan peluang-peluang secara optimal (Cahyandito, 2005).

5. Sustainability Reporting

5.1. Pengertian Sustainability Reporting

Dewasa ini perusahaan dituntut oleh stakeholder kunci seperti karyawan, pemegang saham dan konsumen untuk transparan atas visi/misi, prinsip, tujuan dan kinerjanya dalam segala dimensi pembangunan berkelanjutan. *Sustainability reporting* adalah jawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip KPB. *Sustainability reporting* adalah usaha dari suatu organisasi (perusahaan) dalam memproduksi dan mempublikasikan *sustainability report (SR)*. SR – menurut World Business Council for Sustainable Development – bisa didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada stakeholder internal dan eksternalnya (WBCSD 2002:7). Dengan demikian, SR, idealnya, mengintegrasikan tiga bentuk laporan sebelumnya (keuangan, sosial dan lingkungan).

Bagaimanapun juga, memproduksi SR merupakan proses yang menantang. SR hanyalah puncak dari gunung es. Perusahaan akan sulit membuat laporan yang akurat dan dapat dipercaya tanpa sebelumnya memiliki dan menerapkan sistem informasi dan manajemen

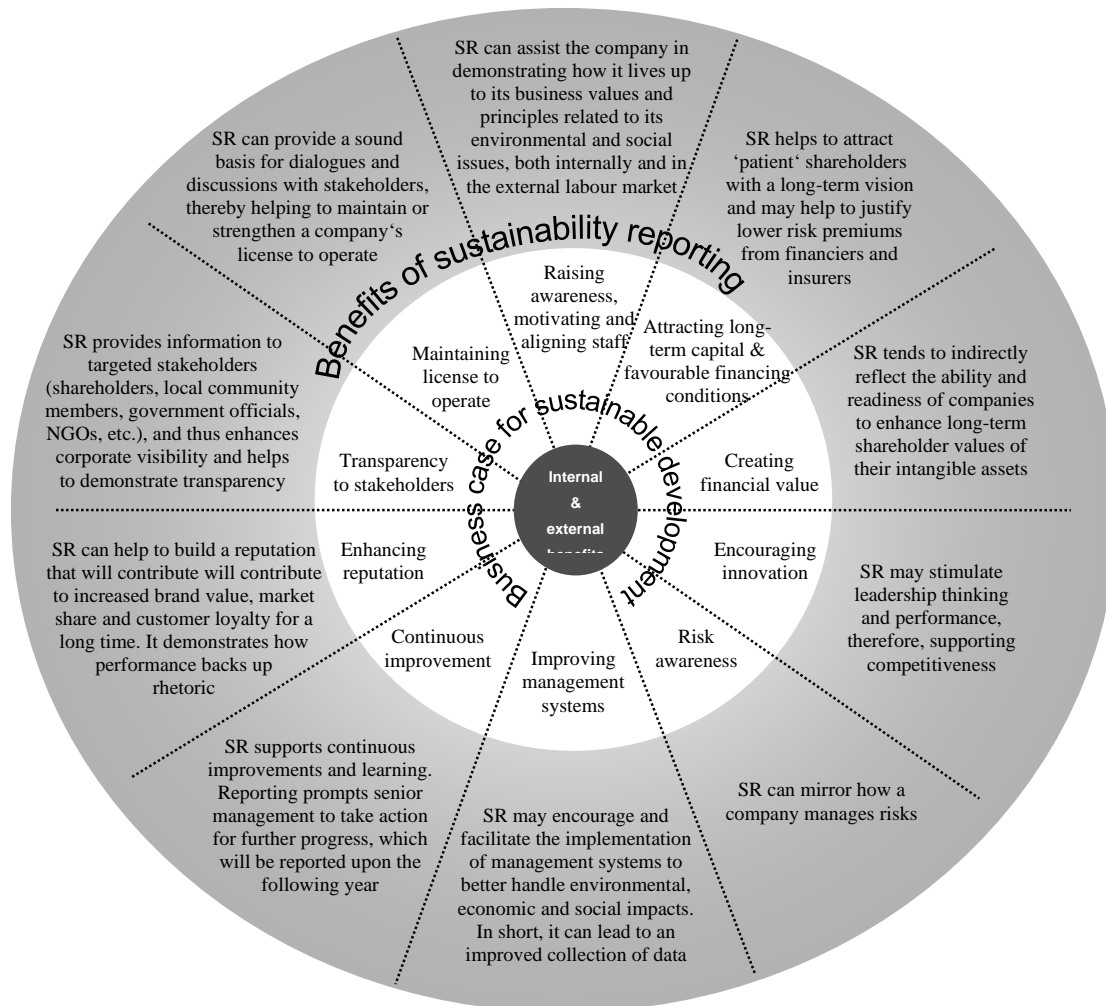
internal yang handal. Memproduksi SR membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan perusahaan, alur tanggung jawab yang jelas dan sumber daya yang memadai. SR bukanlah hasil dari proses *instant*, melainkan merupakan hasil dari pengalaman perusahaan selama bertahun-tahun dalam melakukan aktivitas sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

5.2. Potensi Keuntungan dari *Sustainability Reporting*

Informasi yang ada di dalam SR berguna bagi stakeholder dalam mengambil keputusan sehubungan dengan keterlibatannya dengan perusahaan. Misalnya bagi pemegang saham untuk menentukan apakah akan menahan atau menjual sahamnya; bagi calon pegawai, apakah akan melamar bekerja di perusahaan atau tidak; bagi karyawan perusahaan, apakah tetap menjadi karyawan atau tidak; bagi konsumen, apakah tetap membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan bagi konsumen atau tidak.

Pasar finansial dunia juga semakin menuntut informasi mengenai kinerja lingkungan dan sosial perusahaan karena semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kinerja yang baik di bidang lingkungan dan sosial akan menuntun pada kinerja keuangan yang lebih baik. Kelebihan dari perusahaan yang menerapkan manajemen dan komunikasi berlandaskan konsep pembangunan berkelanjutan ini tercermin pada Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Perbandingan antara Dow Jones Global Index (DJGI) dan DJSI antara periode Januari 1997 dan April 2002 menunjukkan bahwa index pembangunan berkelanjutan secara signifikan lebih tinggi dibanding DJGI. Beberapa investor penting, seperti pension funds di Eropa dan Amerika Utara, pada saat ini juga menggunakan parameter pembangunan berkelanjutan dalam membuat keputusan investasi (Cahyandito 2005).

Bagi perusahaan, begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sustainability reporting seperti yang terlihat dalam gambar 6. Dengan melakukan *sustainability reporting*, perusahaan memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitasnya kepada karyawan sehingga kepedulian dan motivasi kerja karyawan akan meningkat. *Sustainability reporting* yang disampaikan pada pemerintah (badan otoritas) juga akan memberikan kepercayaan sehingga perusahaan akan terus mendapatkan *license to operate*. *Sustainability reporting* yang mengedepankan transparansi sebagai salah satu bentuk *corporate social responsibility* juga akan meningkatkan image perusahaan dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan sehingga stakeholder termasuk investor tetap akan menjaga hubungan baiknya dengan perusahaan.



Gambar 6: Manfaat sustainability reporting (WBCSD, 2002)

5.3. Pertumbuhan SR

Berbagai manfaat yang dapat dipetik oleh perusahaan dari memproduksi dan menerbitkan SR (selain adanya faktor tekanan dan tuntutan dari pemerintah dan stakeholder) menjadi pemicu tumbuhnya SR. Jumlah laporan yang diproduksi oleh organisasi/perusahaan di seluruh dunia bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun (lihat gambar 1; Perhitungan belum selesai untuk tahun 2005). Ini menunjukkan tingginya kesadaran perusahaan akan pentingnya reporting bagi kesuksesan perusahaan. Dari tahun ke tahun SR juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Jumlah SR yang diproduksi di seluruh dunia mengalami kenaikan 30% selama periode 1995-2005 (CorporateRegister).

6. Penutup

Uraian-uraian di atas memberikan argumentasi pentingnya Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan (KPB), baik antara pemerintah dan warga negaranya maupun antara perusahaan dan stakeholernya. KPB merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pencapaian visi pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia merespons dengan mengeluarkan Agenda 21 Nasional yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Lebih jauh, pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mengeluarkan

Agenda 21 Sektoral yang mencakup pertambangan, energi, pariwisata, perumahan, dan kehutanan. Namun sayang sekali, sampai saat ini pola pembangunan di Indonesia masih sangat jauh dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ideal.

Disinilah peran KPB dituntut. KPB harus berfungsi tidak hanya sebagai media informasi antara pemerintah dan warga negaranya atau antara perusahaan dan stakeholdernya, tapi harus lebih jauh lagi, sebagai media pembelajaran agar semua pihak sadar bahwa sistem ekonomi sangatlah bergantung pada sistem sosial dan lingkungan, sehingga pola produksi dan konsumsi manusia haruslah rasional dan menggunakan akal sehat. Kalau pola ekonomi masih mengedepankan hawa nafsu, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan mengabaikan standard/norma-norma sosial, maka keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang akan terancam.

Keberhasilan KPB tergantung dari peran serta aktif semua pihak. Tanpa partisipasi semua lapisan baik pemerintah, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan industri, maka pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan mustahil dicapai. KPB sebagai suatu topik baru dalam dunia akademis dan industri masih memerlukan terobosan-terobosan baru secara teoritis dan praktis agar dapat efektif. Saat ini *sustainability reporting* merupakan topik hangat (trend) dalam ruang lingkup KPB. Terutama di Indonesia, *sustainability communication* dan *sustainability reporting* masih merupakan hal yang sangat aktual dan masih membuka peluang lebar bagi siapapun yang ingin berkecimpung di dalamnya.

Referensi

- Cahyandito, M. F., 2005, *Corporate Sustainability Reporting – A New Approach for Stakeholder Communication*, Kessel Publisher, Remagen-Oberwinter.
- Cahyandito, M. F., 2002, *The sustainable development: Why Reporting Sustainability?* Makalah dipresentasikan pada seminar ISTECS (Institute for Science and Technology) tanggal 13 Juli 2002 di Frankfurt.
- Cahyandito, M. F., 2001, *The MIPS Concept (Material Input Per Unit of Service) for Sustainable Development – Case Study: Material Intensity Analysis with the MIPS Concept at a Foreign Oil Company in Indonesia*, Master Thesis dalam bidang Manajemen Lingkungan di Universitas Freiburg Jerman.
- CorporateRegister, *Global Report Output by Year*, www.corporateregister.com, Di-download tanggal 18 April 2006.
- Enquete Commission, 2002, *Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten*, Schlussbericht, Drucksache 14/9200, Bonn.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2002, *The State of Food Insecurity in the World 2002*, Rome.
- Forum for the Future (Higher Education Partnership for Sustainability), 2003, *Reporting for Sustainability-Guidance for Higher Education Institutions*, November 2003, London
- Hanley, N., Shogren, J.F., White, B., 2001, *Introduction to Environmental Economics*, Oxford University Press, New York.
- Harrison, E. B., 1992, *Achieving Sustainable Communication*, The Columbia Journal of World Business, Fall and Winter 1992, p. 243-247.
- Huber, J., 2001, *Allgemeine Umweltsoziologie*, Wiesbaden.
- Le Monde diplomatique, 2003, *Atlas der Globalisierung*, Berlin.
- Linke, A., Nussbaumer, M., Portmann, P. R., 1996, *Studienbuch Linguistik* (3rd Edition), Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Luhmann, N., 1986, *Ökologische Kommunikation – Kann die moderne Gesellschaft sich auf*

- ökologische Gefährdungen einstellen?* Opladen.
- Michelsen, G., 2005, *Nachhaltigkeitskommunikation: Verständnis – Entwicklung – Perspektiven*. Dalam *Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation: Grundlagen und Praxis*, oekom Verlag, München.
- Sancassiani, W., 1996, *Getting the Message Across: A Proactive Environmental Communication Strategy*, Dow Europe Eco-Management and Auditing 3: 51-55.
- TIME Magazine, 2006, Special Report Global Warming, April 3, 2006, p. 23-37.
- Umweltbundesamt (UBA), 2000, *Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Die Zukunft dauerhaft umweltgeecht gestalten*, Berlin.
- United Nation Development Programme (UNDP), 2002, *Human Development Report 2002 – Deepening Democracy in a Fragmented World*, Oxford, New York.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2002, *Sustainable Development Reporting – Striking a Balance*, WBCSD Report, Atar Roro Presse, Switzerland.
- World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford.
- World Resource Institute (WRI), 2000, *World Resources 2000-2001: People and Ecosystems – The Fraying Web of Life*, Washington D.C.

Foto-foto

- Al-Jazeera, *The War on Terror*,
<http://aljazeera.info/Special%20Reports/Different%20special%20reports/The%20War%20on%20Terror.htm>, Di-download tanggal 14 April 2006.
- BaliBisnis, *Penggunaan Pestisida pada Sektor Pertanian*, www.balibisnis.com, Di-download tanggal 17 April 2006.
- Patmadiwiria, I. N., *Jakarta 2000*, <http://palimpsest.lss.wisc.edu/~emraffer/083a.htm>, Di-download tanggal 14 April 2006.
- Philosophische Praxis und Spirituelle Praxis (PSP), *Hunger*, www.psp.tao.de/interview, Di-download tanggal 17 April 2006.
- PhotoCase, *Berjalan-jalan di Dalam Hutan*, www.photocase.de, Di-download tanggal 10 Maret 2005.